

BAB II

FENOMENA ARAB SPRING

Bab ini akan membahas mengenai sejarah asal muasal dari fenomena arab spring di Kawasan Timur Tengah. Membahas bagaimana kronologi dari fenomena arab spring yang terjadi di Mesir sehingga mengakibatkan turunnya Presiden Hosni Mubarak pada saat itu. Membahas mengenai dinamika setelah masa pemerintahan Mubarak sebelum dilaksungkannya pemilihan umum untuk menentukan presiden yang berasal dari pilihan rakyat.

A. Awal Mula Arab Spring

Istilah *Arab Spring* dipopulerkan oleh media Barat pada awal 2011 ketika pemberontakan yang sukses di Tunisia terhadap mantan pemimpin Zine El Abidine Ben Ali memberanikan protes anti-pemerintah serupa di sebagian besar negara-negara Arab. Istilah ini adalah referensi ke gejolak di Eropa Timur pada tahun 1989 ketika rezim komunis yang tampaknya tak tertembus mulai jatuh di bawah tekanan dari protes massa populer dalam efek domino (Manfreda, 2018). Dalam waktu singkat, sebagian besar negara di bekas blok Komunis mengadopsi sistem politik demokratis dengan ekonomi pasar.

Gerakan protes tahun 2011 pada intinya merupakan ekspresi kemarahan yang mendalam pada kediktatoran Arab yang menua (beberapa di antaranya ditutupi dengan pemilihan umum yang curang), kemarahan terhadap kebrutalan aparat keamanan, pengangguran, kenaikan harga, dan korupsi yang mengikuti privatisasi aset negara di beberapa negara. Tetapi tidak seperti Eropa Timur Komunis pada tahun 1989, tidak ada konsensus mengenai model politik dan ekonomi yang harus diganti dengan sistem yang ada (Manfreda, 2018). Para pengunjuk rasa di monarki seperti Yordania dan Maroko ingin mereformasi sistem di bawah penguasa saat ini, beberapa menyerukan untuk segera transisi ke monarki konstitusional, yang lain puas dengan reformasi bertahap.

Arab Spring merupakan suatu gelombang revolusi sipil yang terjadi di Kawasan Timur Tengah. Gelombang revolusi ini terjadi sebagai akibat dari tuntutan rakyat untuk menurunkan suatu rezim yang tidak memiliki keberpihakan kepada rakyatnya sendiri. Karena adanya suatu revolusi disebabkan adanya ketidakpuasan rakyat kepada pemimpinnya yang tidak dapat ditolerir lagi. Penguasa dianggap telah melakukan kejahatan kepada rakyatnya dengan tidak mengindahkan prinsip dari demokrasi.

Gelombang revolusi di Kawasan Timur Tengah dimulai di negara Tunisia. Tanpa disangka bahwa tuntutan untuk dihadirkannya semangat demokratisasi di negara tersebut justru bermula oleh seorang pemuda berusia 26 tahun yang berprofesi sebagai pedagang sayur-mayur dan buah-buahan. Pekerjaan sebagai pedagang sayur-mayur dan buah-buahan tersebut ia lakukan untuk menghidupi delapan orang anggota keluarganya dengan pendapatan sekitar 150 dolar per bulan (Beritasatu.com, 2011). Seorang pemuda sederhana yang tidak disangka-sangka dapat memantik terjadinya perubahan besar di Kawasan Timur Tengah. Pemuda itu bernama Mohamed Bouazizi yang bertempat tinggal di kota Sidi Bouzid.

Bermula ketika Mohammed Bouazizi sedang berdagang di pasar sebagaimana keseharian biasanya. Ketika itu ia didatangi oleh petugas pemerintahan yang ingin meminta uang sogokan atau pungutan liar sebagai jaminan pemberian izin ia berdagang. Namun, Bouazizi tidak sanggup untuk membayar kepada petugas pemerintah tersebut. Barang dagangan yang Bouazizi jajakan tersebut lalu disita oleh petugas tersebut dengan cara paksaan. Ketika para petugas hendak mengambil timbangan yang Bouazizi miliki, Bouazizi-pun menolaknya. Petugas tersebut melakukan tindakan kekerasan kepada Bouazizi dengan memaki, menampar dan memukul pemuda tersebut agar ia melepaskan timbangannya. Teriakan dan tangisan Mohamed Bouazizi untuk meminta pengampunan para petugas, tidak lantas menghentikan aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum petugas pemerintah tersebut. Seluruh

barang dagangan yang ia pergunakan sebagai penyambung hidup bagi keluarganya tidak tersisa dibawa oleh petugas pemerintahan yang mendatangnya tersebut.

Pasca peristiwa tersebut Bouazizi mendatangi kantor pemerintah kota untuk meminta barang dagangannya dikembalikan, namun tidak ada yang mau menemui pemuda tersebut. Bouazizi lantas pergi ke kantor pemerintah daerah untuk melakukan hal yang sama yakni meminta dikembalikannya barang dagangan yang dirampas. Sama seperti ketika ia mendatangi kantor sebelumnya, ia tidak menemukan apapun. Tidak ada yang mau memperdulikan pemuda sederhana yang hanya berprosi sebagai pedagang biasa tersebut. Tidak ada yang mau meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan kepadanya atas barang dagangan yang dirampas. Pemuda tersebut kemudian pergi membeli bensin. Dengan bensin yang ia beli tersebut ia menyiramkannya ke seluruh tubuhnya dan menyulut api sehingga membakar tubuh Mohamed Bouazizi. Ia frustrasi dengan apa yang menimpa dirinya. Apabila dengan tangisan dan teriakan yang dimilikinya, pemerintah tidak mau untuk mendengarnya. Maka dengan api yang ada di sekujur tubuhnya, ia harap dapat didengarkan oleh pemerintah.

Warga yang berada di sekitar kejadian tersebut lantas mendatangi Bouazizi untuk menolong dan membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Seminggu setelah aksi pembakaran diri tersebut, Presiden Zine El Abidine Ben Ali datang untuk membesuk Mohamed Bouazizi. Tetapi kunjungan Presiden Tunisia tersebut tidak mampu meredam kemaran masyarakat Tunisia yang menuntut dirinya turun. Pembakaran diri yang dilakukan Bouazizi telah menjadi simbol bagi perlawanan atas ketidakadilan rezim pemerintah Zine El Abidine Ben Ali yang telah memimpin selama 23 tahun. Mohamed Bouazizi akhirnya meninggal pada 4 Januari 2011 setelah berhari-hari ia dirawat di rumah sakit sejak 17 Desember 2010 (Viva.co.id, 2011).

Siapa sangka api yang membakar tubuh Mohammed Bouazizi tidak padam begitu saja. Apinya terus membakar ketidakadilan yang tidak hanya terjadi di Negara Tunisia saja tetapi merambah kepada negara-negara yang berada di Kawasan Timur Tengah. Keberanian Bouazizi untuk membakar dirinya sendiri telah menyadarkan masyarakat terutama masyarakat Tunisia untuk berani dalam melawan kesewenang-wenangan penguasa. Sosok Mohammed Bouazizi menunjukkan sebuah keberanian untuk mengeluarkan pendapatnya terhadap apa yang ia perjuangkan. Jika dengan melakukan pembakaran diri dapat menarik perhatian pemerintah untuk mengembalikan barang dagangannya maka ia melakukan hal tersebut.

Masyarakat Timur Tengah dalam upaya mewujudkan demokratisasi di negerinya, tidak hanya melakukan aksi demonstrasi turun ke jalan dalam menyuarakan tuntutan mereka perihal meurunkan rezim non demokratis. Terdapat aspek penting yang turut andil dalam suksesnya gelombang revolusi ini. Media sosial yang digunakan masyarakat dalam mengkampanyekan aksi mereka yang menginginkan adanya demokrasi tidak dapat dilihat sebelah mata. Peran media sosial didalam revolusi Timur Tengah sangat menakjubkan (Umar, Darmawan, Faela, & Ndadari, 2014).

Melalui media sosial, agitasi serta propaganda terkait demokratisasi dapat dengan cepat tersampaikan kepada pihak-pihak yang dituju. Lewat Blog, Facebook, dan Twitter dukungan akan gerakan revolusi ini menjadi bertambah luas. Sebab tidak hanya rakyat satu negara saja yang menolak rezim otoriter, tetapi juga masyarakat dunia juga bisa turut serta. Perkembangan situasi terkini tentang revolusi dapat menyebar dengan singkat melalui media sosial. Dengan begitu dunia internasional juga dapat merasakan bagaimana revolusi tersebut berlangsung, Ketika pemerintah mem-blokir situs-situs terkait gelombang revolusi atau bahkan menutup akses internet. Disanalah terdapat bukti ketakutan pemerintah

terhadap peran media sosial berkenaan dengan gerakan revolusi ini.

Akibat dari revolusi sipil yang bermula di Tunisia, Presiden Tunisia yang telah memimpin selama 23 tahun Zine El Abidine Ben Ali harus turun dari kursi kepemimpinannya. Pengunduran diri Ben Ali disampaikan oleh Mohammed Ghannouchi selaku Perdana Menteri Tunisia melalau stasiun televisi milik pemerintah. Berawal dari keberhasilan rakyat Tunisia untuk menurunkan presidennya, telah memberikan inspirasi bagi negara-negara disekitar Tunisia untuk melakukan hal yang sama. Sebab kondisi sosial yang memiliki persamaan diantara negara-negara di Timur Tengah, revolusi yang terjadi di Tunisia dapat dengan mudah diterima oleh rakyat di negara sekitarnya. Kebanyakan negara di Timur Tengah dipimpin oleh pemerintah yang memimpin cukup lama serta beberapa pemimpin negara di Kawasan Timur Tengah meneruskan jabatannya kepada keturunannya.

Gelombang demokratisasi yang terjadi di Tunisia menjalar ke Negara Mesir yang dipimpin oleh Presiden Hosni Mubarak selama 30 tahun. Kemudian Presiden Moammar Khadafy yang telah menjadi presiden kurang lebih selama 40 tahun (Sahide, 2013). Selanjutnya beberapa negara juga merasakan dampak dari *arab spring*. Hingga Negara Suriah yang sampai saat ini masih berupaya untuk menumbangkan rezim Bashar Al-Ashad. Pemimpin di Negara Timur Tengah tentunya memahami elemen penting dari demokrasi yakni rakyat. Sehingga ketika rakyat sudah menginginkan terjadinya suatu perubahan suka maupun tidak suka perubahan tersebut seharusnya diupayakan terjadi.

B. Arab Spring di Mesir

Ketika menafsirkan sesuatu seperti pergolakan Mesir, masyarakat cenderung memproyeksikan keinginan mereka sendiri ke layar. Pengguna Twitter melihat revolusi media sosial, para kuli melihat kenaikan harga makanan pada intinya,

yang lain melihat kelaparan untuk demokratisasi, kelompok-kelompok hak asasi manusia melihat serangan balik terhadap penyiksaan dan pelecehan yang kerap terjadi. Duncan Green mengkategorikan berbagai penggerak perubahan yang terlibat dalam mewujudkan revolusi (Green, 2011).

Pertama, pertimbangkan demografi: campuran eksplosif dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang mengarah kepada sekumpulan pemuda, dikombinasikan dengan urbanisasi, pertumbuhan pengangguran yang sebagian terkait dengan penyesuaian struktural, dan ekspansi cepat pendidikan universitas telah menghasilkan apa yang dikatakan oleh Paul Mason melalui BBC yakni "tipe sosiologis baru, lulusan tanpa masa depan" (Green, 2011). Dua pertiga penduduk Mesir berusia di bawah 30 tahun, dan setiap tahun 700.000 lulusan baru mengejar 200.000 pekerjaan baru.

Lalu ada teknologi. Meskipun secara naluriah berbagai skeptisisme Malcolm Gladwell tentang ini, media sosial (dan media lama baru seperti al-Jazeera) telah jelas memainkan peranan penting. Ranil Dissanayake tentang Aid Thoughts menulis "hal yang biasa dari bagaimana demonstrasi dimulai dengan cepat dibuat jelas bagi masyarakat di seluruh dunia melalui media tetapi juga melalui jejaring sosial dan ini bisa menjadi dampak nyata dari Facebook dan Twitter, alih-alih fungsi organisasi apa pun, mereka menekankan bahwa demonstrasi dan revolusi sedang dilakukan oleh orang biasa, mengungkap prosesnya" (Green, 2011).

Kebijakan luar negeri Mesir juga telah menjadi faktor penting yang dipisahkan dari opini publik selama bertahun-tahun, terutama pada Israel dan Palestina. Menurut Adam Taylor dan Awny yang bemarkas di Oxfam, hal ini memperkuat perasaan bahwa pemerintah adalah pemerintah boneka AS dan mendelegitimasinya di banyak mata (Green, 2011).

Setelah Zine El Abidine Ben Ali yang diturunkan oleh rakyatnya sendiri. Rakyat Mesir mulai melakukan upaya serupa untuk menurunkan presidennya sendiri yakni Hosni

Mubarak yang telah memimpin selama 30 tahun. Dalam sebuah jajak pendapat yang dilaksanakan oleh stasiun televisi ternama yaitu Al-Jazeera tentang masa pemerintahan Mubarak. Jajak pendapat tersebut menghasilkan bahwa dari total jumlah responden 46.942 orang. Sebanyak 90,7 persen menolak Mubarak untuk melakukan perpanjangan masa jabatan sebagai Presiden Mesir dan sisanya yakni 9,3 persen menerima apabila Hosni Mubarak meperpanjang masa jabatannya (Abdurahman, 2014). Berdasarkan jajak pendapat tersebut memperlihatkan bahwasanya mayoritas dari masyarakat Mesir tidak memiliki keinginan untuk merasakan lagi kepemimpinan Mubarak dan saatnya ia untuk mundur dari kursi jabatannya.

Tingginya presentase jumlah masyarakat Mesir yang menginginkan berakhirnya masa jabatan Mubarak telah memperlihatkan bahwasanya ada yang salah dalam kepemimpinan Mubarak. Masyarakat menginginkan terjadinya suatu perubahan didalam pemerintahan Mesir untuk menciptakan kesejahteraan bagi para rakyatnya. Setelah melihat apa yang terjadi di Tunisia dimana presidennya yaitu Ben Ali berhasil dipaksa mundur oleh rakyatnya sendiri. Menjadikan gerakan massa Tunisia sebagai suatu yang menginspirasi rakyat Mesir untuk melakukan hal yang serupa. Apabila pemimpin mereka tidak mau dengan sukarela turun dari kursi jabatannya, maka rakyatnya sendiri akan memaksa pemimpinnya untuk meninggalkan kursi jabatannya.

Era kepemimpinan Hosni Mubarak yang dianggap sebagai masa-masa kediktatoran, banyak mendapat kritikan dari masyarakat. Dimana pada saat itu kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dibungkam. Pada kepemimpinan Mubarak diwarnai dengan maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme didalam lingkaran pemerintahan Hosni Mubarak. Ketika seorang penguasa diberikan amanah untuk memimpin maka segala apa yang ia lakukan didasari pada kepercayaan dari rakyat tersebut. Praktek KKN yang subur di masa pemerintahan Mubarak telah menciderai kepercayaan

sebagai pemimpin. Sebagai seorang presiden, ia adalah pelayan bagi rakyatnya sendiri bukan pelayan bagi kepentingan para kroninya. Memburuknya perekonomian Mesir menjadikan momok yang menakutkan bagi Mubarak (Safaat, 2011).

Mesir dikenal sebagai pusat peradaban di Kawasan Timur Tengah yang terletak di lokasi strategis diantara tiga benua yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Namun dengan potensi akan kekayaan yang seharusnya dikembangkan, lebih dari setengah rakyat Mesir hidup dalam kemiskinan (Alin, 2016). Situasi ini memicu keresahan bagi masyarakat Mesir terutama bagi kalangan pemuda. Meskipun terkadang golongan pemuda dianggap sebagai golongan yang kurang memiliki pengalaman, nyatanya golongan pemuda dapat menyokong terjadinya perubahan. Zaman yang berubah, cara yang digunakan untuk menciptakan suatu perubahan un telah berganti. Pada konteks *arab spring* ini, media sosial dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan bahwasanya suara rakyat tidak dapat dibungkam begitu saja oleh penguasa. Dengan cepatnya berita bahwa saatnya Mubarak diturunkan, secepat itu pula rakyat bersatu untuk satu hal yang pasti. Rakyat Mesir menginginkan adanya revolusi di negara mereka. Suara-suara teriakan menentang pemerintahan Mubarak tidak hanya terdengar di kota Kairo sebagai ibukota Mesir saja. Tetapi hingga kepelosok wilayah negeri mencakup kota-kota besar lainnya seperti kota Rafah dan Alexandria.

Revolusi di Mesir dimulai pada 25 Januari 2011, pada saat itu demonstrasi pertama kali dilakukan yang diinisiasi oleh para aktivis Mesir melalui media sosial Facebook. Demonstrasi tersebut menimbulkan bentrokan antara pihak keamanan dan para demonstran. Sehingga mengakibatkan korban luka pada kedua pihak yang terlibat keributan. Demonstrasi yang pertama kali dilakukan untuk menuntut Mubarak sebagai Presiden Mesir yang telah memimpin sangat lama untuk turun dari kursi kepresidenan. Membuktikan bahwa kesabaran rakyat terhadap pemerintah telah habis.

Tiada hal yang lain yang diinginkan oleh rakyat selain demokratisasi di negara mereka. Demonstrasi tersebut diberi nama Yaumul Ghadab atau hari kemarahan. Kemarahan rakyat atas kepemimpinan Mubarak yang tidak memihak kepada rakyatnya sendiri.

Pada 26 Januari, pemerintah Mesir mengeluarkan kebijakan untuk memutus seluruh jaringan internet sebagai pencegahan atas meluasnya seruan akan revolusi di Mesir. Jejaring sosial yang digunakan rakyat telah berhasil menggerakkan massa untuk bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi di Mesir. Ketika pemerintah menutup akses internet, berarti terdapat kekhawatiran oleh pemerintah terhadap efektifitas media sosial sebagai alat perjuangan menuntut demokratisasi. Penggunaan media sosial sebagai alat propaganda menentang rezim Mubarak dapat dengan cepat memobilisasi rakyat Mesir untuk berkumpul serta bersatu untuk menyuarakan aspirasi mereka. Konten-konten yang berisi ajakan untuk melakukan aksi perlawanan terhadap pemerintah merupakan bentuk baru sebagai media perjuangan masyarakat terhadap penguasa di era globalisasi. Diputusnya akses internet di wilayah Mesir telah membuktikan bahwa rakyat berhasil menggunakan media sosial dengan efektif demi mewujudkan negara yang demokratis.

Selanjutnya pada 27 Januari seiring dengan terus berlangsungnya demonstrasi penuntutan diturunkannya Mubarak, para petinggi dari pihak oposisi pemerintah turut bergabung didalam demonstrasi bersama masyarakat sipil lainnya. Diantara para petinggi dari pihak oposisi tersebut, juga turut serta mantan Ketua Energi Atom Internasional (IAEA) yaitu Muhammad El Baradei. Bergabungnya pihak oposisi tentu saja menambah kekuatan untuk menekan pemerintah agar segera mengakhiri masa jabatannya. Tekanan terhadap rezim Mubarak yang semakin kuat, nyatanya belum cukup untuk bisa menurunkan Mubarak dari jabatannya. Tetapi bergabungnya pihak oposisi bersama rakyat yang menginginkan terjadinya dmokratisasi di Mesir merupakan

kemajuan yang sangat berarti bagi negeri para Fir'aun tersebut.

Pada 28 Januari, Desakan terhadap pemerintah semakin kuat. Presiden Hosni Mubarak membubarkan kabinetnya dan membentuk pemerintahan baru guna meredam tuntutan terhadap dirinya. Pada hari yang sama demonstrasi yang dilakukan di kota Suez berujung pada terjadinya bentrokan antara para pengunjung rasa dan aparat kepolisian Mesir. Di ibukota Mesir dan di beberapa kota lainnya juga terjadi demonstrasi serupa yang berujung pada bentrokan. Pada bentrokan tersebut memunculkan korban jiwa dan korban luka dikedua kubu yakni antara para demonstran dan pihak keamanan. Sejumlah bangunan milik pihak pemerintah dan partai pendukung pemerintah juga dibakar oleh masa aksi.

Pada 29 Januari, Omar Suleiman ditunjuk sebagai Wakil Presiden serta Ahmad Shafiq diberi tugas untuk membentuk pemerintahan Mesir yang baru. Hal ini dilakukan oleh Mubarak untuk merespon aksi demonstrasi yang terus berlanjut. Tetapi seperti hari-hari sebelumnya, demonstrasi tetap saja berlangsung tanpa ada yang tahu kapan aksi ini akan berakhir. Rakyat Mesir menginginkan adanya perubahan menyeluruh di tubuh pemerintahan Mesir. Bukan hanya mencakup kepada para pejabat pemerintahan, tetapi sang presiden itu sendiri harus diganti. Upaya untuk meredam gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di seluruh penjuru Mesir tampaknya hanya berujung pada tidak adanya perubahan terhadap sikap dari para demonstran. Rakyat tetap saja melakukan aksi mereka sampai keinginan mereka dipenuhi yakni Hosni Mubarak lengser dari jabatannya sebagai Presiden Mesir. Memasuki hari ke-enam pada 30 Januari, warga asing mulai di evakuasi keluar dari wilayah Mesir dikarenakan tidak kondusifnya situasi negara pada saat itu. Pemerintah juga menutup salah satu jaringan televisi terbesar di Timur Tengah yang kerap mengabarkan revolusi di Mesir yakni Al-Jazeera. Penutupan jaringan televisi Al-Jazeera

dilakukan karena stasiun televisi tersebut kerap menyiarkan kondisi demonstrasi yang terjadi di Mesir.

Pada 31 Januari Presiden Hosni Mubarak memerintahkan Wakil Presiden Omar Suleiman untuk berunding dengan pihak oposisi untuk membicarakan tentang amandemen undang-undang dasar. Pemerintah juga mengupayakan untuk menurunkan angka kemiskinan. Pihak militer Mesir mengatakan bahwasanya mereka tidak akan menggunakan cara-cara kekerasan dalam membendung aksi demonstrasi guna menciptakan suasana yang kondusif. Pada 1 Februari, ditengah aksi demonstrasi yang belum menunjukkan bahwa aksi tersebut akan usai. Hosni Mubarak tetap bersikeras untuk mempertahankan jabatannya sebagai Presiden Mesir. Tetapi ia berjanji bahwa tidak akan ikut serta dalam pemilihan umum pada periode selanjutnya.

Pada 2 Februari Militer mengintruksikan kepada masyarakat Mesir yang berkumpul di Lapangan Tahrir untuk membubarkan diri. Akan tetapi bentrokan antara kelompok pendukung Mubarak dan kelompok anti Mubarak malah terjadi. Pada 3 Februari, Omar Suleiman menyatakan bahwa Hosni Mubarak dan anaknya tidak akan mengikuti pemilu selanjutnya. Pada hari yang sama, pihak oposisi menolak untuk mengadakan perundingan dengan pihak pemerintah. Pihak oposisi beralasan perundingan hanya dapat dilaksanakan setelah Mubarak turun dari jabatannya. Di bundaran Tahrir yakni pusat kota Kairo terjadi penembakan terhadap para demonstran yang disinyalir dilakukan oleh kelompok pro Mubarak.

Pada 4 Februari, Masyarakat pendukung revolusi di Mesir menggelar sholat jumat di Lapangan Takhrir. Mereka bersikukuh akan tetap melangsungkan aksi demonstrasi hingga digulingkannya Presiden Hosni Mubarak dari jabatannya. Pada 5 Februari, Gamal Mubarak menyatakan mundur dari jabatan Sekretaris Jendral Partai Nasional Demokrat yang merupakan partai penguasa pada saat itu (Kompas.com, 2011). Hal ini

membuktikan bahwasanya anak dari Mubarak tersebut tidak akan mencalonkan diri pada pemilihan umum mendatang. Keputusan Gamal Mubarak juga diikuti oleh beberapa petinggi partai lainnya. Posisi sekjen partai kemudian digantikan oleh Hossam Badrawi. Pada 6 Februari, kelompok oposisi meminta kepada Omar Suleiman agar tuntutan mereka dipenuhi.

Pada 7 Februari perundingan atau pembicaraan antara pihak oposisi dan pihak pemerintah tidak menemui titik terang. Pada 8 Februari, demonstrasi terbesar sejak 25 Januari lalu terjadi. Massa aksi melakukan blokade terhadap Gedung Parlemen dan Kabinet. Pada 9 Februari, kerusuhan akibat demonstrasi terjadi di kota Al-kharga dengan korban jiwa sebanyak 5 orang sedangkan 100 orang lainnya mengalami luka-luka akibat bentrokan antara demonstran dan polisi. Pada 10 Februari Mubarak menyatakan bahawa dirinya tidak akan mundur hingga berakhirnya masa jabatannya serta menyerahkan segala wewenang kepresidenan kepada Wakil Prsiden Omar Suleiman. Pada 11 Februari, secara mengejutkan Omar Suleiman mengumumkan pengunduran diri Hosni Mubarak dari jabatannya sebagai Presiden. Selanjutnya terkait dengan urusan pemerintahan diserahkan sementara kepada pihak militer Mesir hingga diselenggarakannya pemilu guna memilih presiden yang baru nantinya.

Berita itu disambut dengan ledakan sukacita dan perayaan besar oleh ribuan orang di Lapangan Tahrir Kairo. Mubarak memerintah selama 30 tahun, menekan perbedaan pendapat dan protes, dan memenjarakan lawan. Presiden AS Barack Obama mengatakan bahwa Mesir sekarang harus pindah ke pemerintahan sipil dan demokratis. Ini bukan akhir tetapi awal dan ada hari-hari yang sulit di depan, tambah Presiden AS, tetapi dia yakin orang-orang bisa menemukan jawabannya. "Rakyat Mesir telah berbicara, suara mereka telah didengar," kata Obama (Bbc.com, 2011)

Pengumuman pengunduran diri Mubarak disampaikan oleh Wakil Presiden Omar Suleiman yang mengatakan presiden telah menyerahkan kekuasaan kepada tentara. Suleiman mengatakan di stasiun televisi milik negara bahwa komando tinggi angkatan bersenjata telah mengambil alih. "Dalam nama Tuhan yang penuh belas kasihan, welas asih, warga negara, selama keadaan sulit seperti yang dialami Mesir, Presiden Hosni Mubarak telah memutuskan untuk mundur dari jabatan presiden republik dan telah menuntut dewan tinggi angkatan bersenjata untuk mengelola urusan negara. "katanya. "Semoga Tuhan membantu semua orang." Belakangan seorang perwira militer membacakan sebuah pernyataan yang memberi penghormatan kepada Mubarak karena apa yang telah dia berikan kepada Mesir tetapi mengakui kekuatan rakyat. "Tidak ada legitimasi selain dari masyarakat," kata pernyataan itu. Komando tertinggi militer dipimpin oleh Menteri Pertahanan Mohamed Hussein Tantawi. Mubarak telah meninggalkan Kairo dan berada di Resor Laut Merah Sharm el-Sheikh di mana dia memiliki tempat tinggal, kata para pejabat.

Seiring pengumuman pengunduran diri Hosni Mubarak tersebut, harapan akan terwujudnya negara yang lebih demokratis mulai dipupuk. Rakyat Mesir merayakan turunnya Mubarak dengan melakukan semacam arak-arakan menggunakan terompet (Rahman, 2011). Suasana kebahagiaan tampak tercermin dari setiap raut wajah para demonstran yang sudah menantikan peristiwa bersejarah tersebut. Segala upaya yang telah mereka lakukan untuk memperjuangkan aspirasi mereka, dihadaahi dengan berakhirnya rezim Mubarak. Namun, 18 hari perjuangan rakyat dalam menuntut demokratisasi di Mesir tidak berakhir pada saat pengumuman pengunduran diri Mubarak. Mesir telah memasuki babak baru bagi berlangsungnya kehidupan berdemokrasi yang seharusnya mereka dapat rasakan sejak dulu. Dengan bersatu mereka telah dapat melakukan suatu perubahan dari

pemerintahan yang non demokratis menuju kepada pemerintahan yang demokratis.

C. Dinamika Pasca Mubarak Turun

Pasca pemerintahan Mubarak, banyak menyisakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan setelahnya. Pemerintahan transisi pasca Mubarak yang dipegang oleh SCAF (*Supreme Council of Armed Forces*) memiliki tugas untuk menciptakan kondusifitas dalam negeri. Pemerintah transisi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang memiliki jangka waktu bersifat sementara yang ditunjuk oleh pemerintah yang ada atau pihak yang memiliki otoritas dengan tujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang layak bagi kepemimpinan yang baru (Seely, 2009). Ketika revolusi telah usai menyisakan kegaduhan serta permasalahan di Mesir, seperti masalah perkonomian dan keamanan. Masalah tersebut merupakan buntut dari adanya kerusuhan pada masa revolusi sehingga mengakibatkan roda perekonomian masyarakat tidak berjalan dengan baik serta terjadinya kericuhan yang menjarlar ke seluruh pelosok negeri.

Gerakan untuk penurunan Mubarak yang berlangsung selama 18 hari lamanya telah menyisakan sekelumit persoalan. Terpukulnya Mesir didalam sektor ekonomi menjadikan negara ini harus berjuang untuk keluar dari krisis tersebut jika mereka menginginkan apa yang telah perjuangkan tidak menjadi sia-sia. Sejumlah perusahaan serta pabrik-pabrik yang tutup akibat gelombang demonstrasi yang terjadi mengakibatkan produksi serta perekonomian di Mesir tidak berjalan semestinya. Para pekerja melakukan pemogokan pasca berakhirnya masa pemerintahan Mubarak untuk menuntut gaji mereka segera dibayarkan. Sektor ekonomi merupakan aspek penting bagi suatu negara untuk melakukan pembenahan. Situasi inkondusif dimana kerusuhan yang kerap terjadi saat revolusi berlangsung, menimbulkan situasi yang tidak aman bagi masyarakat Mesir maupun warga negara asing yang sedang berada di Mesir. Ketika revolusi itu berlangsung

banyak warga negara asing yang pergi meninggalkan Mesir menuju tempat yang lebih aman. Para investor juga menarik investasi mereka melihat dari situasi kota-kota Mesir yang diwarnai dengan kerusuhan antara para demonstran dengan aparat keamanan. Credit Agricole menyatakan dampak yang ditimbulkan dari adanya gelombang revolusi tersebut mengakibatkan kerugian sebesar 310 juta US Dollar setiap harinya (Alin, 2016). Dengan kerugian sebesar itu mengakibatkan roda perekonomian menjadi tersendat. Tutupnya perbankan serta sejumlah perusahaan menjadikan Mesir dilanda permasalahan di sektor ekonomi.

Karena dewan bertujuan untuk memulihkan stabilitas dengan sangat cepat dan ingin mempertahankan kepentingannya itu. Sejauh ini, usaha yang dilakukan sangat sedikit untuk membuang sistem kekuasaan lama yang terus berlanjut menembus semua institusi besar (pemerintahan lokal, administrasi, peradilan, media dan seterusnya). Salah satu contoh adalah bahwa pemerintah dinominasikan oleh Mubarak pada 31 Januari 2011, dan karena itu dibentuk oleh loyalis Mubarak, disimpan di tempatnya hingga 22 Februari. Meskipun Pemerintahan sementara kemudian dirombak, Perdana Menteri Ahmed Shafiq, yang ditunjuk oleh Mubarak sesaat sebelum dia mengundurkan diri, tetap di kantor sampai 3 Maret, ketika, mengikuti gelombang protes, dia terpaksa mengundurkan diri. Kabinet baru, dibentuk pada 7 Maret dan dipimpin oleh Essam Sharaf, 46 telah diterima oleh pasukan oposisi dan Mesir pada umumnya. Namun, bahkan jika mereka yang terlalu dekat dengan Mubarak dikeluarkan dari pemerintah, tidak ada alasan untuk mengharapkannya perubahan besar sampai pengambilan keputusan tetap berada di tangan militer dan pemerintah sementara terus memasukkan menteri yang melayani di bawah Mubarak atau memiliki ikatan yang kuat dengan rezim sebelumnya. Dengan cara yang sama, sebagian besar gubernur baru diangkat oleh Dewan Militer pada 14 April 2011, dipilih dari militer dan polisi (Paciello, 2011).

Selain itu, Dewan telah mengatur fase awal transisi ini melalui pendekatan top-down, menandakan potensi terbatas untuk perubahan asli di bawah otoritas sementara. Walaupun tentara telah membuat halaman Facebook untuk mengkomunikasikan tindakannya, transparansi, dan consensus tentu saja tidak ditandai pengambilan keputusan Dewan (Paciello, 2011). Konstitusi harus direformasi tanpa keterlibatan kekuatan politik dan tidak ada ruang untuk perdebatan publik. Meskipun banyak ahli hukum terkemuka diangkat ke komite konstitusi untuk draft amandemen, Dewan tertinggi dinominasikan komite tanpa berkonsultasi dengan kekuatan politik lainnya dan tanpa mengklarifikasi kriteria untuk memilih anggotanya (Paciello, 2011). Tahani Al Gebali, Hakim wanita dan wakil presiden pertama Mesir di Mahkamah Konstitusi Agung mengatakan bahwa Dewan Militer tidak memberikan Konstitusi Agung Pengadilan berkesempatan mengomentari amandemen. Perempuan juga menyesalkan fakta bahwa tidak ada satupun perwakilan mereka diangkat ke komite.

Selain itu, sementara konstitusi proposal disampaikan oleh komite pada 26 Februari, Referendum yang menyetujui itu diselenggarakan pada 19 Maret, meninggalkan sedikit ruang untuk debat publik dan untuk kampanye apapun. Namun, meskipun orang Mesir dipanggil untuk menyetujui amandemen konstitusi dalam Referendum, dua minggu kemudian, Dewan Militer mengeluarkan deklarasi konstitusional termasuk artikel tambahan yang tidak disebutkan dalam Referendum dan menggantikan Konstitusi 1971 Mesir, tanpa konsultasi dengan politik dan kelompok masyarakat sipil. Demikian pula, Hukum Partai Politik Baru, mengubah UU 40 tahun 1977 dan dikeluarkan oleh Dewan Militer pada akhir Maret 2011, dirancang oleh komite yang tidak representative tanpa debat atau konsultasi publik.

Dewan Militer sejauh ini dibuat sangat terbatas dan ragu-ragu dalam hal konsesi politik untuk revolusi. Misalnya, itu tidak menjawab tuntutan demonstran seperti tiba-tiba

berakhirnya hukum darurat, pembebasan segera semua tahanan politik dan mengeluarkan amnesti umum. Tidak ada investigasi sistematis yang dimulai mengenai hal itu bertanggung jawab untuk membunuh demonstran selama pergolakan, sementara banyak yang masih hilang.

Selain itu, meskipun, untuk membatasi monopoli militer dan untuk memungkinkan lebih banyak transisi inklusif, beberapa kekuatan politik telah mengusulkan untuk memasukkan warga sipil dalam transisi dewan, meskipun demikian proposal ini telah keterlaluhan. Juga keputusan oleh sementara pihak berwenang untuk mengganti sejumlah kepala media negara, yang ditunjuk di bawah rezim Mubarak tiba terlambat, pada akhir Maret, dan belum mengubah banyak situasi, seperti kebanyakan telah digantikan oleh tokoh-tokoh kunci dalam lembaga-lembaga ini di bawah rezim sebelumnya (Paciello, 2011). Hanya dalam Pertengahan April 2011, Dewan Militer mulai menanggapi sejumlah permintaan kunci yang dibuat oleh pengunjuk rasa, dalam upaya untuk menenangkan demonstrasi jalanan. Mubarak dan putra-putranya, Gamal dan Alaa, ditangkap pada 12 April, saat investigasi pada sejumlah pria yang dekat dengan Mubarak telah meningkat.

Mantan partai yang berkuasa, NDP, yang terus berfungsi di era pasca-Mubarak, juga dibubarkan pada 15 April. Saat protes jalanan berlanjut pada saat penulisan pada pertengahan April 2011, respon militer terhadap demonstrasi menjadi semakin keras melalui penggunaan kekuatan yang lebih besar, penangkapan dan pelanggaran hak asasi manusia. Episode paling kejam terjadi pada 9 Maret di Tahrir Square, ketika para pengunjuk rasa ditangkap, disiksa dan diadili di pengadilan militer dan pada 9 April, ketika sebuah protes besar di Tahrir Square tersebar melalui kekuatan, menyebabkan kematian satu orang orang (Paciello, 2011). Selain itu, pada 24 Maret, sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kerusuhan buruh, pemerintah sementara menyetujui rancangan undang-undang yang menghukum siapa pun yang mengatur, menghasut atau

berpartisipasi dalam protes itu merusak ekonomi dengan penjara setidaknya selama satu tahun atau dan membayar denda. Beberapa minggu kemudian, meskipun ada kritik keras, rancangan undang-undang itu diratifikasi oleh Dewan Militer.

Penangkapan baru-baru ini dari seorang blogger, yang mengkritik militer melanjutkan metode represif rezim sebelumnya, serta tuntutan Dewan Militer bahwa editor lokal tidak mempublikasikan informasi apa pun tentang Angkatan Bersenjata tanpa konsultasi pertama dengan mereka, tunjukkan mengkhawatirkan hambatan untuk menekan kebebasan di Mesir.⁶⁴ Fakta-fakta ini menandakan risiko kembalinya ke metode represif yang digunakan selama era Mubarak.

Akhirnya, ketegangan sektarian yang muncul kembali dapat menimbulkan masalah lebih lanjut ke transisi politik Mesir, meningkatkan kekacauan, perpecahan dan ketidakstabilan politik. Terlepas dari tanda-tanda persesuaian selama pemberontakan populer melawan Mubarak, ketegangan antara Koptik dan Muslim muncul kembali, sementara meningkatkan tindakan intoleransi yang tampaknya dilakukan oleh kelompok-kelompok Salafi terhadap Sufi dan Koptik telah dilaporkan pada Maret-April 2011.⁶⁶ Interim memiliki otoritas bersikap ambivalen dan tidak mampu mengatasi masalah-masalah ini, yang dapat mengakibatkan memperburuk perpecahan sektarian (Paciello, 2011).

Demonstrasi dan aksi duduk oleh Kopt telah sangat keras ditindas oleh tentara, sementara tindakan intoleransi yang dilakukan oleh kelompok Salafi belum diterima setiap tanggapan oleh otoritas sementara; referendum konstitusi memunculkan polarisasi belum pernah terjadi sebelumnya antara Islamis dan Koptik, dengan Ikhwanul Muslimin dan kelompok-kelompok salafi mendukung amandemen konstitusi yang disahkan oleh militer, sedangkan Gereja Koptik menyerukan konstitusi yang sepenuhnya baru (Paciello, 2011).

Masyarakat juga mengait-ngaitkan pemerintahan transisi yang dibegang oleh militer merupakan kepanjang-tangan dari Hosni Mubarak. Masyarakat khawatir bahwa dengan transisi pemerintahan yang dipegang oleh militer maka sejarah kelam dari rezim Mubarak akan kembali terulang. Tidak segeranya pemerintah melakukan amandemen terkait batasan masa jabatan presiden menimbulkan keresahan bagi masyarakat perihal masa depan Mesir. Kesamaan latar belakang anatara Mubarak dan SCAF yang sama-sama dari latar belakang militer menimbulkan anggapan bahwa pemerintahan transisi merupakan pemerintahan yang dipengaruhi oleh kepentingan Mubarak. Rakyat Mesirpun menuntut agar SCAF untuk segera melaksanakan pemilihan umum untuk menunjuk presiden yang baru.

Pemerintahan transisi yang di pegang oleh militer nyatanya tidak dapat berbuat banyak dalam menangani permasalahan yang ditinggalkan pasca revolusi. Tiga kabinet telah dibentuk selama masa transisi (Alin, 2016). Kabinet-kabinet yang dibentuk ialah kabinet Ahmed Shafiq, kabinet Essam Sharaf dan kabinet Kamal Al Ganzouri. Pergantian Perdana Menteri Mesir dalam kurun waktu kurang lebih setahun menggambarkan bahwa pemerintahan transisi tengah berupaya keras untuk menciptakan kondusifitas di Mesir. Anggapan masyarakat terhadap para pejabat yang dekat dengan rezim Mubarak tentu mempersulit pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Selama masa pemerintahan transisi masih kerap terjadi aksi demonstrasi terhadap pemerintahan yang memiliki wewenang dalam menjalankan negara. Dalam aksi demonstrasi tersebut tidak jarang berkhir dengan kericuhan. Rakyat Mesir menginginkan segera agar pemerintahan yang dipimpin oleh kalangan militer untuk segera berakhir. Mantan juru bicara Ikhwanul Muslimin yakni Dr. Kemal El Hebawy berujar bahwasanya revolusi yang memakan waktu selama satu tahun tersebut merupakan masa yang hilang dari sejarah Mesir (Alin, 2016). Satu tahun yang merupakan waktu

yang diperlukan oleh rakyat Mesir untuk memperjuangkan kebebasan mereka adalah waktu-waktu dimana masa depan Mesir dipertaruhkan. Ketika masyarakat turun ke jalan untuk memperjuangkan hak-hak mereka disanalah arti dari kekuatan dari rakyat.

Beberapa kalangan ingin diadakannya rekonsiliasi nasional agar proses transisi dapat berlangsung dengan damai. Pemerintahan yang sekarang dipegang oleh pihak militer dapat diserahkan kepada pemerintahan yang dipimipin oleh kalangan sipil. Rekonsiliasi diperlukan guna mencari titik temu diantara dua kubu yang terbagi dua antara kubu anti militer dan kubu yang mendukung militer. Dengan begitu peralihan kekuasaan yang diharapkan dapat segera terwujud dapat dilakukan dengan damai.